

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa

Lusiana Rahmatiani^{a,1}

^a Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹ lusianarahmatiani@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter baik. Pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana untuk mempersiapkan generasi muda dengan bekal yang cukup memuni dalam pergaulan kehidupan yang dibutuhkan. Kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, mempunyai sikap dan tindak yang demokratis menjadi media pendukung dalam pembentukan karakter bangsa. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan studi pustaka. Kondisi generasi muda Indonesia dewasa ini berada dalam posisi yang cukup meresahkan. Menurunnya semangat belajar yang sekarang ini sudah berada pada titik nadir yang mengkhawatirkan. Generasi muda yang semakin memperlihatkan adanya degradasi moral yang menandakan generasi muda tidak lagi memiliki karakter yang baik. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Kontruksi nilai-nilai karakter melalui pendidikan kewarganegaraan secara yuridis formal menjadi salah satu mata pelajaran wajib disetiap jenjang dan jalur pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai di perguruan tinggi. Pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu keharusan karena dapat membentuk generasi muda yang cerdas, juga mempunyai budi pekerti yang luhur sehingga keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bermakna dan mempunyai karakter.

Kata kunci: *pendidikan kewarganegaraan, karakter bangsa*

Copyright ©2020 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

PENDAHULUAN

Dewasa ini menurunnya semangat belajar yang sekarang ini sudah berada pada titik nadir yang mengkhawatirkan. Kemajuan perkembangan zaman membuka sisi lain kehidupan yang berimbas pada kader-kader muda sebagai generasi penerus bangsa yang terancam kehilangan masa depan yang berkualitas jika tidak di imbangi dengan pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter bangsa. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai pembentuk karakter bangsa menjadi salah satu upaya dalam memfilter degradasi moral generasi muda dan menurunnya etika dengan ditandai maraknya kenakalan remaja, seperti tawuran dan pecandu narkoba.

Merujuk pada pola peradaban barat yang dijadikan gaya hidup oleh mayoritas generasi muda negeri ini adalah kehidupan yang hedonis, materialis, dan permisif. Dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di rumah, mahasiswa sekarang tidak mempunyai orientasi hidup, target, cita-cita, dan kebulatan tekad dalam membangun masa depan mereka. Banyaknya ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berupa meningkatnya tawuran remaja, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya, seperti pemerasan, kekerasan, pembunuhan bahkan adanya bullying yang

cenderung dilakukan oleh senior terhadap junior, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Ketimpangan tersebut terjadi karena rendahnya moral dari hasil pendidikan yang tidak menanamkan nilai karakter, dan juga akibat dari pengaruh globalisasi.

Pada realitas di atas, sungguh sangat ironis generasi muda harus meniru gaya peradaban barat yang selayaknya bangsa kita mempunyai karakter baik yang terbingkai dalam Pancasila. Kaum muda yang seharusnya menjadi teladan belum mampu menunjukkan sikap yang patut untuk diteladani. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai krisis moral. Moral yang seolah-olah sudah tidak ada lagi dan sudah tidak lagi diagungkan dalam pergaulan kehidupan.

Berdasarkan realitas kehidupan dewasa ini dengan berbagai krisis moral, maka menjadi sangat penting untuk adanya implementasi dan realisasi pembentukan karakter bangsa melalui proses pendidikan. Dalam hal ini, PKn diharapkan dapat menjadi wahana dalam pembentukan nilai karakter bangsa yang mulai terkikis. Salah satu misi yang diemban PKn adalah sebagai pendidikan karakter, disamping misi lain sebagai pendidikan politik/pendidikan demokrasi, pendidikan moral dan pendidikan hukum di setiap jenis dan jenjang pendidikan (Susiatik, 2013).

Adanya perubahan karakter peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa pada hakikatnya bukanlah hanya sekedar akibat dari dampak penggiring (*nurturant effect*) tetapi menjadi suatu upaya yang sengaja direncanakan (*instructional effect*). Hal ini tercermin pada tiga komponen penting dalam PKn yaitu *civic knowledge, civic skill dan civic disposition*. Dengan kata lain, adanya suatu usaha dalam pembentukan karakter pada mata kuliah/mata pelajaran PKn tercermin kuat pada tiga komponen utama PKn, pada hakikatnya harus membentuk watak/karakter bangsa. Hal ini merupakan tantangan untuk menunjukkan bahwa PKn sebagai ujung tombak sebagai penguat dalam pembentukan karakter bangsa (*Nation Character Building*). Dalam penulisan ini difokuskan pada “PKn sebagai Pembentuk Karakter Bangsa”.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bersumber baik dari jurnal maupun buku yang terkait mengenai PKn sebagai pembentuk karakter bangsa. Studi pustaka atau disebut juga studi teks (Muhadjir, 2000). Penelitian ini adalah penelitian studi teks atau studi pustaka, yang mencakup; pertama, telaah teoritik suatu disiplin ilmu yang perlu dilanjutkan secara empirik untuk memperoleh kebenaran secara empirik pula. Kedua, studi yang berupaya mempelajari seluruh obyek penelitian secara filosofis atau teoritik dan terkait dengan validitas. Ketiga, studi yang berupaya mempelajari teoritik linguistik. Keempat, adalah studi karya sastra (Muhadjir, 2000). Penggunaan metode ini adalah untuk memahami secara mendalam dan komprehensif tentang PKn dan karakter bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan

PKn diambil dari istilah *Civic Education*, dan oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE (Indonesian Center for Civic Education), sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin. S. Winataputra, dan Tim CISED (Center Indonesian for Civic Education) (Winataputra, 2012)

Branson (1999), mengingatkan bahwa civic education seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari

pengembangan warga negara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan dengan komitmen yang benar terhadap nilai-nilai dari prinsip fundamental dan demokrasi.

Soemantri (2001) mengemukakan bahwa mata pelajaran PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut Azis Wahab, PKn merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut (Cholisin, 2013).

Pada prinsipnya PKn mempersiapkan generasi muda dengan bekal yang cukup mempunyai dalam pergaulan kehidupan yang dibutuhkan. Kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, mempunyai sikap dan tindak yang demokratis menjadi media pendukung dalam pembentukan karakter bangsa.

PKn menurut Depdiknas (2006), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Selaras dengan hal tersebut, PKn tertuang dalam UU tentang sistem pendidikan nasional, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Tujuan PKn adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia (Wahab & Sapriya, 2011). Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan

serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Selaras dengan tujuan PKn menurut Sapriya, adapun tujuan umum pelajaran PKn menurut Somantri, ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” (Somantri, 2001).

PKn, sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religious serta memiliki karakteristik yang multidimensional, perlu dilihat dalam tiga kependudukan. *Pertama*, PKn sebagai suatu kajian mengenai “*civic virtue*” dan “*civic culture*” yang menjadi landasan PKn sebagai program kurikuler dan gerakan sosial budaya kewarganegaraan. *Kedua*, PKn sebagai program kurikuler memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religious baik dalam latar pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, yang berfungsi sebagai dasar orientasi dari keseluruhan upaya akademis untuk memahami fenomena dan masalah-masalah sosial secara interdisipliner, sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. *Ketiga*, PKn sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “*civic virtue*” dan “*civic culture*” melalui partisipatif aktif secara cerdas, demokratis, dan religious dalam lingkungannya (Winataputra, 2001, 2012).

Relevansi pada suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PKn itu pada hakikatnya adalah program pendidikan yang memuat bahasan mengenai kebangsaan yang erat kaitannya dengan hubungan antara negara, warga negara, partisipasi warga negara, demokrasi, Hak Asasi Manusia, religious, masalah sosial dan masyarakat yang humanis.

Rosyada, dkk (2005) mengungkapkan tujuan PKn, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik ditingkat lokal, nasional, regional, dan global;
2. Menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis;

3. Menghasilkan mahasiswa yang berfikiran komprehensif, analitis, kritis, dan bertindak demokratis;
4. Mengembangkan kultur demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan;
5. Mampu membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen* (warga negara yang baik dan bertanggungjawab) melalui penanaman moral dan keterampilan (*social skills*) sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan seperti toleransi, perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, kesadaran hukum dan tertib sosial, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan demokratisasi dalam berbagai lapangan kehidupan, dan menghargai kearifan lokal (*local wisdom*).

Rasionalisasi dari PKn, dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda dalam mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara yang baik. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Socrates bahwa tujuan yang paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi “*good and smart*”.

PKn memberikan harapan yang dapat membawa dan menggiring generasi muda memiliki tingkah laku sesuai dengan tujuan PKn yang akan membawa bangsa pada karakter yang diinginkan melalui proses wahana PKn dengan bekal yang baik dalam komposisi pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik, dengan demikian harapan baru harapan *national building* dapat terwujud. Pada hakikatnya, pengajaran PKn berbeda dengan pengajaran pendidikan lain yang menuntut ketepatan, karena dalam pembelajaran PKn lebih berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang sulit untuk mendapatkan ketepatan. Ide pokok pada PKn dapat membentuk warga negara yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan, warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki watak pribadi yang baik, berpengetahuan, mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial (*social life skill*).

Karakteristik PKn dimaksudkan agar sejalan dengan ide pokok pelajaran PKn yang ingin

membentuk warga negara yang ideal, yaitu warga negara yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpengetahuan, mempunyai keterampilan, dan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kewarganegaraan.

Karakter Bangsa

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa (Rahmatiani, 2017)

Wynne (Zuchdi, 2015), mengatakan bahwa ada dua pengertian tentang karakter. Kesatu, karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk atau berkarakter buruk. Sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan "personality". Seseorang baru bisa disebut "orang berkarakter" apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral (Zuchdi, 2015). Sejalan dengan hal tersebut Lickona (Lickona, 2013) menyebut pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek "knowing the good", tetapi juga "desiring the good" atau "loving the good" dan "acting the good".

Suyanto (2011) mengemukakan, karakter adalah sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Selaras dengan Suyanto, Hasanah (2012) mengatakan bahwasannya karakter bangsa dibangun dari nilai etika inti (*core ethical values*) yang bersumber dari nilai-nilai agama, falsafah negara dan budaya. Nilai yang bersumber dari budaya bangsa amat banyak dan beragam serta mengandung nilai luhur bangsa yang dapat menjadikan bangsa ini memiliki modal sosial yang tangguh untuk membangun peradaban unggul.

Relevansi secara umum mengenai karakter dapat dikatakan sebagai pola pikir dan pola perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu, dalam pergaulan kehidupan baik lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Nilai karakter merupakan salah satu aspek yang harus menjelma

pada setiap insan manusia dan dilakukan dalam setiap aktivitas insan manusia dalam pola kehidupan. Penguatan revolusi karakter bangsa melalui PKn yang menanamkan budi pekerti, mendukung pembangunan karakter generasi muda sebagai bagian dari revolusi mental, yang termasuk sebagai arah orientasi program penguatan pendidikan karakter yang menjadi paradigma pembangunan nasional.

Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional (2010) telah mengidentifikasi mengidentifikasi 18 nilai-nilai karakter bangsa dalam pendidikan karakter, yaitu:

1. *Religius*, Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. *Jujur*, Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. *Toleransi*, Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. *Disiplin*, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. *Kerja Keras*, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
6. *Kreatif*, Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. *Mandiri*, Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. *Demokratis*, Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. *Rasa Ingin Tahu*, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. *Semangat Kebangsaan*, Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. *Cinta Tanah Air*, Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

12. *Menghargai Prestasi*, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. *Bersahabat/Komunikatif*, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14. *Cinta Damai*, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
15. *Gemar Membaca*, Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. *Peduli Lingkungan*, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. *Peduli Sosial*, Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. *Tanggung Jawab*, Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

The character of a nation is required by the next generation to take the nation towards karater nation expected that 18 characters nation Indonesia, with this expected future generation has an indicator of character in the planting itself which must planting character/ character who either do not arise by itself but rather the habituation, planting and cultivation, one of which became a vital role in the world of school is subject Civics (Rahmatiani et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa karakter merupakan rangkaian komponen yang perlu ditanamkan, dibiasakan dan pembudayaan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa menuju goal national building.

Manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat, sebagai berikut: religius, moderat, cerdas, dan mandiri. **Sifat religius**, dicirikan oleh sikap hidup dan

kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran. **Sifat moderat**, dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. **Sifat cerdas**, dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. **Sikap mandiri**, dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa (Juliardi, 2015).

Karakter dimaknai sebagai nilai utama yang melekat pada setiap insan manusia sebagai warga negara yang kemudian diejawantahkan sebagai personalitas diri serta penanda identitas kolektif bangsa. Dalam konteks suatu bangsa, karakter berfungsi sebagai kekuatan identitas dan kekuatan mental bangsa yang mendorong suatu bangsa dalam merealisasikan cita-cita dan tujuan pembangunan bangsa, dengan menampilkan keunggulan-keunggulan yang kompetitif, komparatif dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa

Pendidikan merupakan upaya strategis dalam pembentukan sistem nilai yang ada dalam diri seseorang, yang kaitannya dengan perwujudan harkat dan martabat sebagai manusia sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang melingkupinya. Pendidikan senantiasa mengarahkan upaya dalam peningkatan kesadaran, harkat dan martabat seseorang baik secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Sejalan degan hal tersebut, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan yang mengarahkan tujuan pada pembentukan karakter salah satunya adalah PKn. PKn sudah menjadi bagian inheren instrumentasi pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”. PKn hendak mempersiapkan para peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan cakap karakter, berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. PKn menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

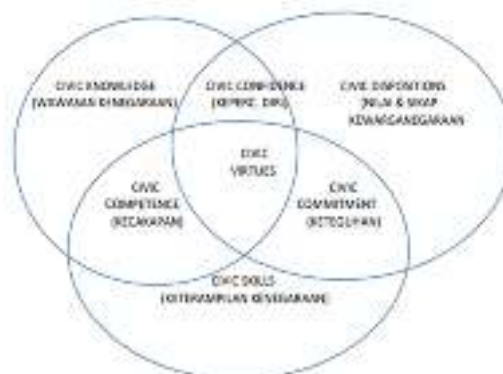
Civic education memberdayakan warga negara untuk dapat membuat pilihan yang bijak dan penuh dengan kesadaran dari berbagai alternative yang ditawarkan, memberikan pengalaman-pengalaman dan pemahaman yang dapat memupuk berkembangnya komitmen yang benar terhadap nilai-nilai dan prinsip yang memberdayakan sebuah masyarakat bebas untuk tetap bertahan. Jika bidang PKn mengkaji fokus kajian, maka arah fokus kajian sebenarnya dari ideologi PKn yang sangat esensial adalah perilaku warga negara. PKn juga memiliki fungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

PKn menjadi leading sector dari pembentukan karakter. Oleh karena itu tujuan pembentukan karakter ditetapkan dalam pembelajaran PKn. Salah satu wahana yang paling tepat untuk menghidupkan kembali pembentukan karakter melalui pembelajaran PKn, dalam artian bahwa nilai-nilai dalam pendidikan karakter diimplementasikan dalam PKn melalui proses integrasi. Integrasi nilai pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan pola tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. PKn menjadi mata pelajaran yang dianggap begitu penting karena PKn sebagai leading sector dari pendidikan karakter.

Nilai karakter harus ditanamkan semenjak dini karena akan membentuk pembiasaan diri dalam melaksanakan nilai-nilai karakter dalam kehidupan tanpa mereka sadari dan secara perlahan akan membentuk karakter baik dalam diri peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang rentan dengan terjangan arus globalisasi, yang akan membawa mereka secara perlahan

meninggalkan jatidiri bangsa Indonesia dengan hidup apatis (Rahmatiani, 2017).

PKn secara konseptual merupakan program pendidikan yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan pribadi warga negara paripurna. Secara psikologis ranah pembinaan seyogyanya dikembangkan melalui pembelajaran PKn, seperti yang digambarkan oleh Winataputra (2014).



Gambar.1 Dimensi Utuh Warga Negara

Inti dari kepribadian warga negara adalah kebijakan kewarganegaraan (*civic virtues*). Pengembangan kebijakan kewarganegaraan perlu ditopang dengan adanya pengembangan elemen-elemen yang meliputinya yakni: wawasan atau pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), dan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*). Secara menyeluruh pengembangan kebijakan kewarganegaraan sangat diperlukan oleh setiap orang agar mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan yang cerdas dan bertanggung jawab (*intelligent and responsible civic participation*).

Berkenaan dengan hal tersebut, PKn memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara agar memiliki komitmen yang kuat serta konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PKn memberikan kontribusi terhadap tanggung jawab pendidikan yang memiliki fokus pada pembentukan diri dari bidang agama, sosio-kultural, suku bangsa, bahasa, untuk menjadikan warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*), PKn memiliki kedudukan fungsi dan peran yang sangat penting. PKn merupakan salah satu pendidikan

berkarakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bangsa dan karakter (Akbal, 2016).



Gambar 1. Kerangka Kebijakan Nasional Pembangunan Bangsa dan Karakter (Mengkokesra: 2010 dalam Akbal, 2016)

Dapat disimpulkan bahwasannya posisi PKn sangat strategis dalam pembentukan karakter bangsa, secara substansi pendidikan kewarganegaraan dimanfaatkan sebagai wahana untuk tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan setiap rezim yang sedang berkuasa di Indonesia. PKn sebagai salah satu pilar penyangga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa yang artinya bahwa PKn mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dalam menghadapi perkembangan dunia pada era kompetitif dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn bertujuan untuk menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketaqwaan, nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau sopan santun. PKn menjadi salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran PKn kepada peserta didik, karena pada dasarnya tujuan PKn adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi generasi muda yang berakhlak mulia, menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

PKn memberikan bekal kepada peserta didik sebagai generasi muda dalam mencetak warga negara yang berkarakter baik dengan memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. PKn senantiasa menghadapi dinamika perubahan

dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn mempersiapkan generasi muda untuk masa depan dengan ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia pada eksistensi konstitusi negara dalam membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsanya sendiri membawa perubahan kearah yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan cita-cita sebuah bangsa, melalui PKn dalam mencetak generasi muda yang memiliki karakter bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karuniaNya yang diberikan pada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan untu kedua orang tua, suami dan putri penulis yang selalu mendorong penulis untuk terus berkarya. Terima kasih kepada seluruh panitia semnaspkn#2 yang telah memberikan ruang dan kesempatannya pada penulis untuk tetap berkarya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini sampai dengan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Seminar Nasional "Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global."*
- Branson, M. S. (1999). *Globalization and its implication for civic education.* http://www.civiced.org/papers_Oct99_branson.html.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Penerbit Ombak.
- Hasanah, A. (2012). Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada masyarakat minoritas (Studi atas kearifan lokal masyarakat adat suku Baduy Banten). *Analisis, XII(1)*, 209–228.
- Juliardi, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 2(2)*, 3.
- Lickona, T. (2013). *Character Matter (Persoalan Karakter): Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan Penting Lainnya*. Bumi Aksara.

- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif: Pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metafisik telaah studi teks dan penelitian agama (IV)*. Rake Sarasin.
- Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Pusat Kurikulum, Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rahmatiani, L. (2017). Pembentukan karakter siswa melalui program Lisa, Libra, Patujar di SMPN 1 Cilamaya Wetan. *CIVICS*, 2(1), 45–55.
- Rahmatiani, L., Nugraha, Y., & Sari, P. (2020). Role of learning PPKn to improving students civics disposition in senior highs school. *Psychosocial: International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7). <https://www.psychosocial.com/article/PR270299/14975/>
- Rozak, A., Sayuti, W., & Salim GP, M. A. (2005). *Rosyada, D., Ubaidillah, A., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan Prenada Media.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.
- Susiatik, T. (2013). Pengaruh Pembelajaran PKn Terhadap Pembentukan Karakter Siswa. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, xx(4), 58–72.
- Suyanto. (2011). *Urgensi Pendidikan Karakter*. Mandikdasmen Depdiknas. <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Widya Aksara Press.
- Winataputra, U. S. (2014). Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Konteks Kurikulum 2013. *Seminar Nasional AP3KNI*, 1–12.
- Zuchdi, D. (Ed.). (2015). *Pendidikan karakter: Konsep dasar dan implementasi di perguruan tinggi*. UNY Press.